



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUCHAMAD RACHMAT ROGIANTO, ST, MT**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**
Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 1 November 2023

Pihak Kedua,

AL MUKTABAR

Pihak Pertama,

MUCHAMAD RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

SATUAN KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DPPA TA-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Rumah, Penataan Kawasan Permukiman yang Layak dan Tata Kelola Pertanahan	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	91,73
		Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau	Persen	60,79
		Luasan Permukiman Kumuh	Ha	219,00
		Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	77.250.000
4.1.02	Retribusi Daerah	77.250.000
	JUMLAH PENDAPATAN	77.250.000

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	485.592.248.800
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.662.335.066
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	28.885.309.500
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	76.102.227.661
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	348.460.606.973
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	481.769.600
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	439.947.800
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	88.464.100

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	176.928.200
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	174.555.500
	JUMLAH BELANJA	486.032.196.600

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

MUCHAMAD RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **R. NUGRAHA DANANJAYA, ST**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERTANAHAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang,

2023

Pihak Kedua,

M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

Pihak Pertama,

R. NUGRAHA DANANJAYA, ST
NIP. 19730103 200112 1 002

SATUAN KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DPPA TA-2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yag selesai tepat waktu	Persen	100
2	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	100
3	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	Persen	100

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	439.947.800
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	439.947.800
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	88.464.100
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	88.464.100
2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	88.464.100
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	176.928.200
2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	176.928.200
2.10.06.1.01.02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	88.464.100
2.10.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	88.464.100

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	174.555.500
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	174.555.500
2.10.10.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	86.091.400
2.10.10.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	88.464.100

Serang,

2023

Pihak Kedua,



M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

Pihak Pertama,



R. NUGRAHA DANANJAYA, ST
NIP. 19730103 200112 1 002

Daftar Data

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/INDIKAT OR PROGRAM/KEGIATAN	KODE	DAFTAR DATA
2	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi		
		2.10.03.1.01.01	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		2.10.06.1.01.02	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reform Agraria Lintas Daerah Kabupaten/kota
		2.10.06.1.01.03	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reform Agraris
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		2.10.10.1.01.01	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1(satu) Provinsi
		2.10.10.1.01.02	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi

SATUAN KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DPPA TA-2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yag selesai tepat waktu	Persen	100
2	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	100
3	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	Persen	100

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	439.947.800
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	439.947.800
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	88.464.100
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	88.464.100
2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	88.464.100
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	176.928.200
2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	176.928.200
2.10.06.1.01.02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	88.464.100
2.10.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	88.464.100



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RINTO YUWONO, ST, MM**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang,

2023

Pihak Kedua,

M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

Pihak Pertama,

RINTO YUWONO, ST, MM
NIP. 19691017 199703 1 004

SATUAN KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DPPA TA-2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	485.494.762.243
1.04	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	485.494.762.243
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.642.335.066
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.533.470.000
1.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	626.750.300
1.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000
1.04.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000
1.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.900.000
1.04.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000
1.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	593.917.000
1.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	284.902.700
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.214.394.800
1.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.482.050.000
1.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	650.000.000
1.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500.000.000

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.04.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000
1.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000
1.04.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000
1.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	72.394.800
1.04.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000
1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	426.288.400
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	482.584.400
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.444.714.228
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.430.344.100
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.450.506.538
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.660.032.600

Serang,

2023

Pihak Kedua,

M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

Pihak Pertama,

RINTO YUWONO, ST, MM
NIP. 19691017 199703 1 004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tb. ASEP SETIAWAN, ST**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERMUKIMAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang,

2023

Pihak Kedua,

M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

Pihak Pertama,

Tb. ASEP SETIAWAN, ST
NIP. 19670131 200112 1 001

SATUAN KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DPPA TA-2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Hektar	219,00
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Persen	91,73

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	485.494.762.243
1.04	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	485.494.762.243
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	78.100.700.000
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.700.000,000
1.04.03.1.01.02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	91.384.300
1.04.03.1.01.05	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	111.320.050
1.04.03.1.01.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	2.031.451.000
1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	125.100.000
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	78.098.000.000
1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3.886.138.500
1.04.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4.657.045.900

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	17.261.060.025
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	47.938.727.886
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS	346.460.606.973
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	348.460.606.973
1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	2.577.810.680
1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	318.589.274.179
1.04.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	27.293.522.114

Serang

2023

Pihak Kedua,



M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

Pihak Pertama,



Tb. ASEP SETIAWAN, ST
NIP. 19670131 200112 1 001

Daftar Data

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/INDIKAT OR PROGRAM/KEGIATAN	KODE	DAFTAR DATA
1	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
		1.04.03.1.01.02	Jumlah Terlaksananya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
		1.04.03.1.01.05	Jumlah Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
		1.04.03.1.01.08	Jumlah Terlaksananya Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
		1.04.03.1.01.09	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
		1.04.03.1.02.01	Jumlah Dokumen Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
		1.04.03.1.02.02	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya

			Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
		1.04.03.1.02.03	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
		1.04.03.1.02.07	Jumlah Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS		
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		
		1.04.05.1.01.01	Jumlah Dokumen Perencana Penyediaan PSU Permukiman
		1.04.05.1.01.02	Jumlah Lokasi Permukiman Yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman
		1.04.05.1.01.03	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasanata, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUHADI, ST, MMT**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERUMAHAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang,

2023

Pihak Kedua,

M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

Pihak Pertama,

SUHADI, ST, MMT
NIP. 19690403 200112 1 004

SATUAN KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DPPA TA-2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase Penyediaan Rumah korban bencana skala Provinsi	Persen	43,50
		Presentase relokasi rumah terdampak program Provinsi	Persen	25,00
2	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah	Persen	100

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	485.494.762.243
1.04	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	485.494.762.243
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	28.809.150.604
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.425.085.600
1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	325.600.000
1.04.02.1.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	625.600.000
1.04.02.1.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	100.000.000
1.04.02.1.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	100.000.000
1.04.02.1.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	100.000.000
1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	175.885.600
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	168.481.104

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.04.02.1.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	168.481.104
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	27.077.512.900
1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.307.065.400
1.04.02.1.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	18.247.244.300
1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provins	7.320.916.000
1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	138.271.000
1.04.02.1.04.02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	138.271.000
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	481.769.600
1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	481.769.600
1.04.06.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	481.769.600

Serang, 2023

Pihak Kedua,



M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
NIP. 19710720 200212 1 004

Pihak Pertama,



SUHADI, ST, MMT
NIP. 19690403 200112 1 004

Daftar Data

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/INDIKAT OR PROGRAM/KEGIATAN	KODE	DAFTAR DATA
1	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
		1.04.02.1.01.01	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi
		1.04.02.1.01.02	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
		1.04.02.1.01.03	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
		1.04.02.1.01.04	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani
		1.04.02.1.01.05	Jumlah Dokumen Data Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
		1.04.02.1.01.06	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
		1.04.02.1.02.04	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
		1.04.02.1.03.02	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi
		1.04.02.1.03.04	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang terbangun
		1.04.02.1.03.05	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban

			Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun
1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
		1.04.02.1.04.02	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah		
		1.04.06.1.01.01	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MEZFI INDRIANI, ST**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RINTO YUWONO, ST, MM**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang,

2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

RINTO YUWONO, ST, MM
NIP. 19691017 199703 1 004

MEZFI INDRIANI, ST
NIP. 19751003 201001 2 003

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1
6	Peningkatan Sarana dan Parasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	4
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Infoemasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1
10	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1
12	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	4

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Bangunan Kantor yang Disediakan		
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1
18	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	184
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1
22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen	1
23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	37
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
30	Peralatan dan Meisn Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	376
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	17
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	56

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	485.494.762.243
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	485.494.762.243
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.642.335.066
1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	426.288.400
1.04.01.1.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000
1.04.01.1.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000
1.04.01.1.03.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	209.960.000
1.04.01.1.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000
1.04.01.1.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	106.500.000
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	482.584.400
1.04.01.1.05.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0
1.04.01.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	164.350.000
1.04.01.1.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000
1.04.01.1.05.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	204.584.000
1.04.01.1.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	88.650.000
1.04.01.1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000
1.04.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.444.714.228
1.04.01.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000
1.04.01.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	888.509.400
1.04.01.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.176.000
1.04.01.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000
1.04.01.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000
1.04.01.1.06.7	Penyediaan Bahan/Material	1.609.150.400
1.04.01.1.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.450.000
1.04.01.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	297.628.428
1.04.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	163.000.000
1.04.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	58.800.000
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.430.344.100
1.04.01.1.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.891.746.000
1.04.01.1.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	538.598.100
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.450.506.538
1.04.01.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.056.000
1.04.01.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	349.345.600
1.04.01.1.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000
1.04.01.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.026.104.938
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.660.032.600
1.04.01.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	200.000.000
1.04.01.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	1.138.670.000
1.04.01.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	446.362.600
1.04.01.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	575.000.000
1.04.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000

Serang,

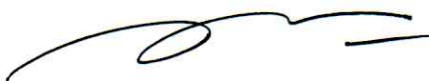
2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



RINTO YUWONO, ST, MM
NIP. 19691017 199703 1 004



MEZFI INDRIANI, ST
NIP. 19751003 201001 2 003

Daftar Data

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/INDIKAT OR PROGRAM/KEGIATAN	KODE	DAFTAR DATA
1	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
		1.04.01.1.03.1	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		1.04.01.1.03.2	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		1.04.01.1.03.3	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
		1.04.01.1.03.5	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laoran Barang Milik Darah pasa SKPD
		1.04.01.1.03.6	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		1.04.01.1.05.1	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
		1.04.01.1.05.2	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		1.04.01.1.05.3	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		1.04.01.1.05.4	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
		1.04.01.1.05.5	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		1.04.01.1.05.9	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

		1.04.01.1.05.10	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		1.04.01.1.06.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		1.04.01.1.06.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		1.04.01.1.06.4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		1.04.01.1.06.5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
		1.04.01.1.06.6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
		1.04.01.1.06.7	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
		1.04.01.1.06.8	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
		1.04.01.1.06.9	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		1.04.01.1.06.10	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		1.04.01.1.06.11	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		1.04.01.1.07.2	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
		1.04.01.1.07.6	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		1.04.01.1.08.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

		1.04.01.1.08.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang Disediakan
		1.04.01.1.08.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		1.04.01.1.08.4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		1.04.01.1.09.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
		1.04.01.1.09.2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		1.04.01.1.09.6	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
		1.04.01.1.09.9	umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
		1.04.01.1.09.10	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya